

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan, secara umum, mencakup segala upaya yang dilakukan guna meningkatkan kondisi ekonomi, sosial, dan infrastruktur suatu wilayah atau negara. Pembangunan ini sering kali diukur melalui indikator ekonomi seperti pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur. Pembangunan dan pembangunan manusia saling berkaitan erat, dengan fokus yang saling melengkapi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat (Marliana, 2022).

Pembangunan manusia merupakan pendekatan yang lebih luas dan holistik, yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup individu dan masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan manusia tidak hanya melihat aspek ekonomi, tetapi juga kesehatan, pendidikan, dan hak asasi manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengukur pembangunan manusia (Marliana, 2022).

Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik Tahun 2023 menjelaskan capaian Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur mencapai 74,65. Ini menunjukkan peningkatan di semua dimensi IPM, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pada dimensi kesehatan, bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan hidup hingga 74,87 tahun. Dalam dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah meningkat menjadi 13,38 tahun, dan rata-rata lama sekolah mencapai 8,11 tahun. Sementara itu, dimensi standar hidup layak juga meningkat dengan pengeluaran riil per kapita naik sebesar 3,58%. Meskipun IPM

Jawa Timur telah mengalami peningkatan, beberapa masalah tetap ada yang mempengaruhi kualitas pembangunan manusia di wilayah tersebut. Beberapa tantangan utama yang dihadapi Jawa Timur dalam meningkatkan IPM meliputi ketimpangan regional, kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, perbedaan kualitas pendidikan serta kesehatan beberapa kabupaten maupun kota di wilayah Jawa Timur.

Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik Jawa Timur menjelaskan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Blitar urutan ke 21 dari 38 kabupaten dan kota pada Jawa Timur, hal ini bisa dikatakan IPM pada Kabupaten Blitar berada di tingkat rendah. Nilai indeks pembangunan manusia pada kabupaten dan kota Jawa Timur selalu mengalami kenaikan maupun penurunan setiap tahunnya. Setiap tahun selama lima tahun terakhir, dari tahun 2019 hingga 2023, mengalami kenaikan, namun Kabupaten Blitar hanya sedikit peningkatan pada setiap tahunnya sehingga masih kalah dengan 10 besar di Jawa Timur, termasuk dengan Kabupaten yang berdampingan langsung dengan Kabupaten Blitar yang lebih indeks pembangunan manusianya lebih unggul seperti Kabupaten Kediri dan Kabupaten Tulungagung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari grafik 1.1.

Grafik 1.1
Data IPM 3 Kabupaten Jawa Timur 2019 - 2023



Sumber : BPS, diolah

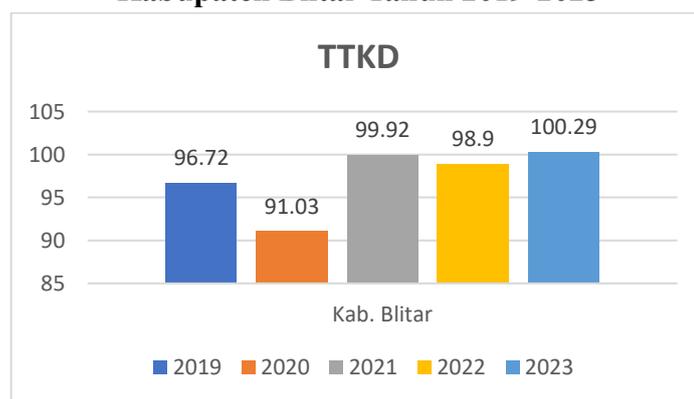
Pada grafik diatas menunjukkan indeks pembangunan manusia pada Kabupaten Blitar menempati posisi terendah dibandingkan dengan 2 kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Blitar, yaitu Kabupaten Kediri dan Kabupaten Tulungagung. Dimana nilai terendah indeks pembangunan manusia Kabupaten Blitar pada Tahun 2020 dengan nilai 70,58 dibanding dengan Kabupaten Kediri dengan nilai 72,05 dan Kabupaten Tulungagung dengan nilai 73. Rendahnya pencapaian pada indeks pembangunan manusia pada Kabupaten Blitar menggambarkan bahwa pembangunan manusia pada Kabupaten Blitar tergolong rendah, hal ini tentunya akan berdampak pada indeks pembangunan pada daerah tersebut.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencerminkan upaya guna pengukuran serta memahami Pembangunan suatu negara Tidak hanya faktor ekonomi, tetapi juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Keterampilan manusia sangat penting bagi pertumbuhan suatu negara. adalah salah satu komponen dari IPM. Administrasi masyarakat pada konteks IPM mencakup pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Pendidikan menjadi indikator penting karena memiliki dampak langsung terhadap kapasitas individu untuk berkontribusi dalam masyarakat dan perekonomian. Peningkatan tingkat pendidikan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kreativitas individu, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kesehatan adalah dimensi lain yang signifikan dalam IPM. Akses terhadap layanan kesehatan yang baik, penyediaan air bersih, sanitasi, dan upaya pencegahan penyakit menjadi elemen penting dalam meningkatkan standar hidup individu. Kesempatan

berlimpah bagi sumber daya manusia yang sehat guna berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi dan sosial (Herdiansyah & Kurniati, 2020).

Dalam hal ini penting bagi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan visi pembangunan manusia yang tinggi ke dalam perencanaan dan pengelolaan APBD. Transfer pemerintah ke Kabupaten Blitar memainkan peran penting dalam pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat. Transfer ini dapat berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang digunakan untuk berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi. Transfer ini membantu mengurangi ketimpangan antar daerah, meningkatkan pelayanan publik, dan mendukung program-program pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, transfer pemerintah berperan krusial dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Blitar. Untuk lebih jelasnya berikut besaran transfer pemerintah dapat dilihat dari grafik 1.2.

Grafik 1.2
Data Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Kabupaten Blitar Tahun 2019-2023



Sumber : djpk.kemenkeu.go.id, diolah

Pada grafik 1.2 menunjukkan TKDD pada Kabupaten Blitar yang memiliki nilai cukup tinggi dengan nilai rata-rata 90 miliar pada 5 tahun terakhir. TKDD ini

kemudian dipergunakan guna pelaksanaan pembangunan pada berbagai sektor dimana salah satunya yaitu sektor pendidikan.

Sektor pendidikan menjadi salah satu fokus utama dalam pengalokasian belanja daerah. Investasi dalam pendidikan memiliki dampak jangka panjang pada peningkatan IPM, dengan membuka akses pendidikan yang lebih luas dan meningkatkan mutu pendidikan. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan guru, serta penyediaan bantuan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan dapat menjadi prioritas untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas (Herdiansyah & Kurniati, 2020). Untuk lebih jelasnya berikut besaran TKDD yang dikeluarkan untuk sektor pendidikan dapat dilihat pada grafik 1.3.

Grafik 1.3
Data Belanja Pendidikan Kabupaten Blitar 2019 – 2023



Sumber : Pemkab Kab. Blitar, diolah

Dari grafik 1.3 menunjukkan data yang telah diperoleh melalui Pemkab terlihat adanya naik turun nilai belanja pendidikan 5 tahun terakhir, yaitu 2019-2023 di Kabupaten Blitar. Belanja pendidikan di Kabupaten Blitar, sangat penting dalam menunjang berbagai pelaksanaan pembangunan di sektor pendidikan. Dana ini digunakan untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan, menyediakan fasilitas dan sarana belajar yang memadai, serta mendukung program-program peningkatan

kualitas pendidikan seperti pelatihan guru, beasiswa untuk siswa berprestasi, dan kegiatan ekstrakurikuler. Dengan alokasi yang tepat, TKDD dapat membantu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Blitar, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tersebut.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas di grafik 1.2 TKDD Kabupaten Blitar diperguna sebagai pelaksanaan pembangunan pada berbagai sektor dimana salah satunya yaitu, sektor kesehatan. Sektor kesehatan juga memegang peran penting dalam peningkatan IPM. Belanja daerah dapat diarahkan pada penyediaan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, pembangunan fasilitas kesehatan, serta program-program preventif untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Langkah-langkah ini akan mendukung peningkatan harapan hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. (Herdiansyah & Kurniati, 2020). Untuk lebih jelasnya berikut besaran TKDD yang dikeluarkan untuk sektor kesehatan dapat dilihat pada grafik 1.4.

Grafik 1.4
Data Belanja Kesehatan kabupaten Blitar 2019 – 2023



Sumber : Pemkab Kab. Blitar, diolah

Dilihat dari garifik diatas menunjukkan perubahan grafik nilai belanja kesehatan pada Kabupaten Blitar tahun 2019 sampai 2023. Belanja Kesehatan Kabupaten Blitar dipergunakan untuk menunjang berbagai pelaksanaan pembangunan pada sektor kesehatan, yang mencakup peningkatan fasilitas kesehatan, penyediaan obat-obatan, dan program kesehatan masyarakat. Ini bertujuan untuk memastikan akses yang lebih baik dan layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh warga, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Blitar. Peningkatan pada sektor kesehatan ini juga diharapkan berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah.

Selain itu, standar hidup juga menjadi bagian integral dalam mengukur kesejahteraan manusia. Ini mencakup aspek-aspek seperti pendapatan per kapita, keamanan pangan, dan perumahan yang layak. Kesejahteraan sumber daya manusia tercermin dalam kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meraih standar hidup yang layak. Dalam konteks IPM, sumber daya manusia diukur guna menilai sejauh mana masyarakat mendapat akses keadilan pada pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang memadai. Melalui penerapan indeks ini, diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih holistik dan inklusif terhadap kemajuan suatu negara, tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga memperhitungkan kesejahteraan dan perkembangan manusia secara menyeluruh (Herdiansyah & Kurniati, 2020).

Tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia karena kemiskinan berdampak langsung terhadap pada indikator pengukuran dalam indeks pembangunan manusia yaitu pendidikan,

kesehatan dan standart hidup. Kemiskinan terjadi ketikan seseorang tidak mampu memnuhi kebutuhan hidup sehari – hari secara layak. Kemiskinan ini biasa disebabkan oleh upah minimum yang kurang memdai sehingga menyebabkan kurangnya pemenuhan kebutuhan baik dari segi kesehatan hingga pendidikan yang berakibat bagi indeks pembangunan manusia pada daerah itu sendiri. Bebagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah guna menekan angka kemiskinan dengan melakukan pembangunan berkelanjutan. Kemiskinan ini tidak hanya terjadi di nagara namun di Tingkat kota/kabupaten pun tidak terbebas dari masalah kemiskinan. Ada beberapa kabupaten di Jawa Timur seperti Kabupaten Blitar memiliki masalah kemiskinan, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur (Purnama, 2017). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari grafik 1.4.

Grafik 1.4
Data Tingkat Kemiskinan Kabupaten Blitar 2019 - 2023



Sumber : BPS, diolah

Grafik diatas menunjukkan perubahan prosentase nilai pada tingkat kemiskinan Kabupaten Blitar pada Tahun 2019-2023. Untuk tahun 2019 sampai 2021 mengalami kenaikan yang cukup besae dimana keadaan tersebut disebabkan dengan adanya covid-19 yang melanda seluruh wilayah Indonesia bahkan hingga seluruh negara lain sehingga mengakibatkan penurunan pada angka kerja karena

mengharuskan seluruh manusia untuk tidak melakukan kegiatan di luar rumah sehingga banyak para pekerja lapangan yang harus kerja dirumahkan bahkan banyak tempat kerja yang melakukan PHK atau pemberhentian para perekerjanya karena untuk mengurangi penyebaran angka covid-19. Namun untuk tahun 2022 sudah mengalami penurunan kembali karena sudah mengalami pemulihan pada pertumbuhan ekonomi dimana kebijakan bekerja di rumah yang sudah ditiadakan dan para pekerja yang sebelumnya terkena dampak pemberhentian kerja mulai kembali bekerja sebagaimana mestinya.

Untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya, sebuah daerah harus berfokus pada pembangunan manusia. Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang optimal memiliki tantangan tersendiri di wilayah Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Blitar. Beberapa elemen penting, termasuk pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan serta tingkat kemiskinan, mungkin memiliki dampak besar pada keberhasilan atau kegagalan upaya untuk mencapai tujuan pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Dengan menggunakan literatur sebagai titik awal, penelitian ini akan menguji bagaimana tingkat kemiskinan, belanja kesehatan, dan belanja pendidikan di Kabupaten Blitar mempengaruhi IPM. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan hubungan yang berarti antara ketiga faktor tersebut dengan memeriksa data yang relevan. Pemerintah di tingkat lokal harus dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk menginformasikan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang lebih baik yang bermanfaat bagi konstituen mereka. Tujuan lain tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal lain yang dapat mempengaruhi IPM di wilayah Blitar. Dalam rangka menciptakan rencana pembangunan yang terfokus

dan berkelanjutan, pemerintah Blitar membutuhkan pemahaman yang menyeluruh mengenai hubungan antara belanja kesehatan, belanja pendidikan, tingkat kemiskinan, dan IPM.

Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk dua alasan. Pertama, untuk menilai dan mengoptimalkan anggaran negara dan kedua, untuk mengembangkan kebijakan yang dapat meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat Kabupaten Blitar. Pneliti berharap bahwa penelitian ini akan menjadi sumber daya yang berharga untuk inisiatif di masa depan untuk meningkatkan IPM dan mengurangi kemiskinan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Belanja Pendidikan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia?
2. Apakah Belanja Belanja Kesehatan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia?
3. Apakah Tingkat Kemiskinan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia?

1.3 Tujuan Masalah

1. Untuk menganalisis pengaruh Belanja Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
2. Untuk menganalisis pengaruh Belanja Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
3. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

1.4 Ruang Lingkup

Berkaitan dengan hal-hal yang telah dibahas. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengetahui berapa banyak yang dihabiskan oleh penduduk Kabupaten Blitar untuk perawatan kesehatan dan berapa banyak anak yang bersekolah. Tiga hal yang dipilih karena memiliki pengaruh besar terhadap IPM adalah jumlah kemiskinan, biaya kesehatan, dan biaya sekolah. Penelitian ini melihat bagaimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terkait dengan tiga hal di Kabupaten Blitar dari tahun 2014 hingga 2023: jumlah penduduk miskin, jumlah yang dihabiskan untuk perawatan kesehatan, dan jumlah yang dihabiskan untuk belajar.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, guna pembelajaran serta langkah awal penerapan dari ilmu pengetahuan yang didapatkan serta sebagai pengalaman yang kemudian dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dimasa yang akan datang.
2. Bagi akademis, guna penelitian ini akan menambah literatur akademis yang membahas hubungan antara belanja publik dan indikator sosial-ekonomi dengan IPM, khususnya di daerah tertentu seperti Kabupaten Blitar, dapat sebagai dasar teoretis dan empiris bagi studi-studi lain yang berfokus pada topik serupa dan dapat dijadikan bahan referensi peneliti yang tertarik dengan isu-isu pembangunan manusia dan pengaruh belanja pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat.

3. Bagi pemerintah, guna saran untuk pemerintah atau pihak yang terkait dengan proses penyusunan kebijakan yang berhubungan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kabupaten Blitar.
4. Bagi peneliti selanjutnya, guna acuan bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan serta informasi mengenai Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan dan Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten Blitar.